



PEMERINTAH  
KABUPATEN LUMAJANG

# LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV

## TAHUN 2022

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG**

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIBUNAL IV TAHUN 2022

## BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas **Sekretaris** terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja **Sekretaris**.

**Sekretaris** merupakan salah satu bagian yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan **Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 108 Tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, bidang penelitian, dan pengembangan. Sedangkan Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, **Sekretaris** mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan pada Badan;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pada Badan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan;
- d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;
- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- f. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- h. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa;
- i. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Sekretaris** mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang dimulai pada **Tahun 2022**.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1 PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana **Perjanjian Kinerja Tahun 2022** yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sekretaris yang menyatakan menjanjikan akan melaksanakan **1 (satu) Sasaran** dan **7 (tujuh) Indikator Kinerja** dan **1 (satu) program** dengan **7 (tujuh) kegiatan** dengan uraian, sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100%
		Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	100%
		Persentase fasilitasi administrasi kepegawaian PD	100%
		Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja	100%
		Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%
		Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.500.000,00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.093.765.193,00
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.790.000,00
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	531.496.013,00
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.085.187,00
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.391.065,00
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.562.860,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.349.590.318,00</b>

## 2.2 CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 TRI BULAN IV :

Tabel 2.1  
Capaian Kinerja TRI BULAN IV Sekretariat Bappeda 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi %	Capaian %	Ket.
1	Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100 %	100 %	100 %	
		Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	
		Persentase fasilitasi administrasi kepegawaian PD	100 %	100 %	100 %	
		Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja	100 %	100 %	100 %	
		Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100 %	100 %	100 %	
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	100 %	100 %	
		Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100 %	100 %	100 %	

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2022, jumlah alokasi anggaran Bappeda Kabupaten Lumajang khususnya di lingkup Sekretariat dengan pagu anggaran **Rp 4.349.590.318,00** dengan realisasi sebesar **Rp 4.208.699.996** atau sebesar **96,76 %** secara detail penyerapan anggaran tahun 2022 tersaji dalam tabel berikut :

## 2.2 . Cost per outcome Sekretaris Bappeda Tri Bulan IV Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	Target %	Realisasi %	Capaian %	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b> Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	4.349.590.318	4.208.699.996	96,76	100	100	100	-
1	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	5.500.000	5.194.000	94,44%	100	100	100	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi keuangan perangkat daerah	3.093.765.193	2.960.980.973	96,35%	100	100	100	-
3	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi kepegawalan PD	49.790.000	43.289.000	86,94%	100	100	100	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja	551.496.013	530.094.965	99,74%	100	100	100	-
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD	55.085.187	54.915.000	99,69%	100	100	100	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	439.391.065	424.139.858	96,53%	100	100	100	-
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD	174.562.860	170.086.200	97,44%	100	100	100	-

## 2.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah, sebagai berikut :

**SASARAN STRATEGIS :**  
Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan penunjang  
urusan pemerintah daerah

Dalam rangka mendorong pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebuah organisasi melalui Sekretariat Bappeda dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan terhadap capaian atas target kinerja, telah **mencapai** angka 100 % sesuai realisasi anggaran di Sekretariat.

Langkah-langkah yang diupayakan dalam mewujudkan keberhasilan yang dilakukan adalah secara intens melakukan **koordinasi** kepada Subag Kepegawaian dan Pejabat Fungsional juga pejabat pelaksana di Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.



## 2.4 RENCANA TINDAK LANJUT

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua Sub Bagian dalam rangka mencapai target realisasasi yang harus sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan anggaran, agar penerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan serta melakukan monitoring sebagai upaya perbaikan perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

Mendorong Kasubag. umum dan kepegawaian dan pejabat fungsional serta pejabat pelaksana di Sekretariat untuk memiliki Kelompok Budaya Kerja dan berfungsi sebagaimana mestinya.

## 2.5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
  - Laporan sudah baik
  - Laporan diperbaiki
  - Target dan realisasi diteliti ulang
  - Capaian diteliti ulang
  - Lain-lain .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 dapat disimpulkan secara ringkas, sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 108 Tahun 2021, telah dapat dilaksanakan 100 % sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari **1 program** dengan **7 (tujuh) kegiatan** yang ditetapkan, **1 (satu) sasaran** dan 7 (tujuh) indikator kinerja, dimana target tersebut 96,76 % **berhasil diwujudkan** dengan optimal.
3. Hal – hal yang mendukung keberhasilan yaitu ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia yang ada telah melakukan kegiatan yang sama / rutin setiap tahunnya.

#### LEMBAR PENGESAHAN

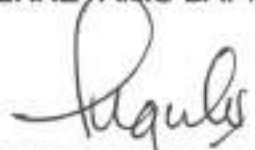
Lumajang, Januari 2023

Mengetahui,  
KEPALA BAPPEDA



*[Handwritten Signature]*  
Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si.  
NIP. 19670325 199312 2 001

SEKRETARIS BAPPEDA



PUGUH BUDI LASWONO, S.T., M.T.  
NIP. 19780508 200903 1 005

**LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bagian Umum dan Kepegawian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tri bulan keempat ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawian merupakan salah satu Bagian yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2013 dan telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Uraian, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawian tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan terkait kepegawain;
- e. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;

- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris..

Sub Bagian Umum dan Kepegawian mempunyai peran penting dalam penyusunan Rencana Program, administrasi kepegawaian, pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang, urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan dan keprotokolan dan urusan kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**1.1 PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, antara lain:

**TABEL**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terealisasinya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah fasilitasi pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	3 Fasilitasi
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 jenis
3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 jenis
4	Terselenggaranya Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 jenis, 1 fas
5	Terselenggaranya Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan konsultasi	3 fasilitasi
6	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	2 unit
7	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan jasa surat menyurat	1 fasilitasi
8	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Rekening
9	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Fasilitasi
10	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasioanal atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	25 unit

11	Terpeliharanya Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	5 jenis
12	Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	1 jenis

Tabel 2.2

*Cost per outcome* Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tribulan 4 Tahun 2022

No	Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Effisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	(9-6) (%)
1	Terealisasinya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah fasilitas pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	2.000.000	1.929.000	96,45	3 Fasilitas	3 fasilitas	100	3
2	Tertaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	47.790.000	41.360.000	86,55	6 orang	5 orang	100	1
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2.494.140	2.403.000	96,35	2 jenis	2 jenis	100	1
3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	81.616.623	80.965.100	98,94	5 jenis	5 jenis	100	1
4	Terselenggaranya Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	44.473.250	44.465.825	99,98	3 jenis, 1 fas	3 jenis, 1 fas	100	5
5	Terselenggaranya Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan konsultasi	442.912.000	422.291.040	96,85	3 fasilitas	3 fasilitas	100	1
6	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	55.085.187	54.915.000	100	2 unit	2 unit	100	0
7	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan jasa surat menyurat	7.367.500	6.084.074	98,85	1 fasilitas	1 fasilitas	100	1
38	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	138.079.965	129.635.210	93,88	4 Rekening	4 Rekening	100	1
9	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum	293.943.800	288.420.574	98,12	4 Fasilitas	4 Fasilitas	100	1

	Kantor	kantor yang disediakan							
10	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	90.663.000	86.359.100	95,25	25 unit	25 unit	100	0
11	Terpeliharanya Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	67.900.000	67.832.100	99,90	3 jenis	3 jenis	100	0
12	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	15.900.860	15.895.000	99,34	1 jenis	1 jenis	100	0

## 1.2 CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 :

Tabel 2.1  
Capaian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawian

Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terealisasinya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Jumlah fasilitasi pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawain	3 Fasilitasi	3 fasilitasi	100
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 jenis	2 jenis	100
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 jenis	5 jenis	100
Terselenggaranya Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 jenis, 1 fas	3 jenis, 1 fas	100
Terselenggaranya Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan konsultasi	3 fasilitasi	3 fasilitasi	100
Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	2 unit	2 unit	100
Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan jasa surat menyurat	1 fasilitasi	1 fasilitasi	100
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Rekening	4 Rekening	100
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	Jumlah penyediaan jasa pelayanan	4 Fasilitasi	4 Fasilitasi	100

Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Kantor	umum kantor yang disediakan			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	25 unit	25 unit	100
Terpeliharanya Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	5 jenis	3 jenis	100
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitas	1 jenis	1 jenis	100



### **1.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditandatangani telah dilaksanakan dengan baik. Realisasi Sub Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang telah terlaksana dengan baik di tribulan IV.

#### 1.4 RENCANA TINDAK LANJUT.

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua Bidang dalam rangka Pencapaian target Realisasi harus sesuai dengan Time Scedul yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan Anggaran, agar penyerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon IV sesuai ketentuan serta melakukan monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk Evaluasi atas Implementasi LKj OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Mendorong setiap Bidang untuk memiliki Kelompok Budaya Kerja dan berfungsi sebagaimana mestinya.

#### 1.5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

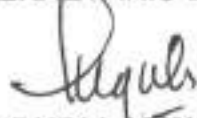
### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 108 Tahun 2021, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 12 target sasaran sub kegiatan yang ditetapkan, berhasil diwujudkan dengan optimal.

Lumajang, Januari 2023

Mengetahui,  
SEKRETARIS BAPPEDA



PUGUH BUDI LASWONO, S.T., M.T.  
NIP. 19780508 200903 1 005

KEPALA SUB. BAGIAN  
UMUM DAN KEPEGAWAIAN



HARDINA MEIDIASTUTI, SE.  
NIP. 19790526 201101 2 005

**LAPORAN KINERJA PEJABAT  
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tribulan ke IV Tahun 2022 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda melaksanakan penyusunan kebijakan serta melaksanakan penelitian dan pengembangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Bidang Penelitian dan Pengembangan terbagi menjadi 3 kelompok sub sunstansi, yaitu :

1. Kelompok Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan;
2. Kelompok Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
3. Kelompok Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana kerja Badan;
- c. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bappeda dengan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdapat target kinerja yang harus dipenuhi, yaitu :

Tabel 1  
Perjanjian Kinerja  
Bidang Penelitian dan Pengembangan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Termanfaatkannya kajian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Persentase Kajian bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan	100%
2	Termanfaatkannya kajian bidang sosial dan kependudukan	Persentase Kajian bidang Bidang Sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan	100%
3	Termanfaatkannya Kajian bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase Kajian bidang Bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan	100%
4	Terfasilitasinya kegiatan inovasi dan teknologi	Persentase kegiatan inovasi dan teknologi yang dapat difasilitasi	2 dok

	Kegiatan		Anggaran
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp	664.827.625
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan	Rp	100.000.000
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp	400.000.000
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp	546.132.250
	Jumlah	Rp	1.710.959.625

## B. CAPAIAN KINERJA

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran kegiatan bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, serta target kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2022.

Tabel 2  
Rencana Capaian Kinerja Tribulan ke IV Tahun 2022  
Bidang Penelitian dan Pengembangan

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	<b>Kegiatan:</b> Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan <b>Sub Kegiatan:</b> Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Fasilitasi 4 Dokumen	1 Fasilitasi 4 Dokumen	99,33%	
2	<b>Kegiatan:</b> Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan <b>Sub Kegiatan:</b> Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Fasilitasi 1 Dokumen	1 Fasilitasi 1 Dokumen	99,4%	
3	<b>Kegiatan:</b> Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan <b>Sub Kegiatan:</b>	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	3 Dokumen	3 Dokumen	93,9%	

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan					
4	<b>Kegiatan:</b> Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan <b>Sub Kegiatan:</b> Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen	99,6%	
5	<b>Kegiatan:</b> Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan <b>Sub Kegiatan:</b> Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	1 Dokumen	99,6%	
6	<b>Kegiatan:</b> Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan <b>Sub Kegiatan:</b> Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	99,2%	
7	<b>Kegiatan:</b> Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan <b>Sub Kegiatan:</b> Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
8	<b>Kegiatan:</b> Pengembangan Inovasi dan Teknologi <b>Sub Kegiatan:</b>	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan	4 Aplikasi 7 Fasilitasi	4 Aplikasi 6 Fasilitasi	90%	



No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				
9	<b>Kegiatan:</b> Pengembangan Inovasi dan Teknologi <b>Sub Kegiatan:</b> Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Fasilitasi	1 Fasilitasi	87%	

Tabel 3  
Realisasi Program Kegiatan  
Bidang Penelitian dan Pengembangan  
Sampai Triwulan ke IV Tahun 2022

No	Sub kegiatan	Rp.	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	Capaian	Ket
1	<b>Kegiatan:</b> Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan <b>Sub Kegiatan:</b> Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Rp	306.156.000	304.107.500	2.048.500	99,33%	
2	<b>Kegiatan:</b> Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan <b>Sub Kegiatan:</b> Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Rp	206.381.000	205.242.000	1.139.000	99,4%	

3	<b>Kegiatan:</b> Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan  <b>Sub Kegiatan:</b> Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Rp	152.290.375	143.048.000	9.242.375	93,9%
4	<b>Kegiatan:</b> Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan  <b>Sub Kegiatan:</b> Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Rp	100.000.000	99.550.000	450.000	99,6%
5	<b>Kegiatan:</b> Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan  <b>Sub Kegiatan:</b> Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp	100.000.000	99.935.000	65.000	99,6%
6	<b>Kegiatan:</b> Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan  <b>Sub Kegiatan:</b> Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Rp	100.000.000	99.213.400	786.600	99,2%
7	<b>Kegiatan:</b> Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp	200.000.000	200.000.000	0	100%

8	<b>Kegiatan:</b> Pengembangan Inovasi dan Teknologi  <b>Sub Kegiatan:</b> Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp	536.132.250	485.026.250	51.106.000	90%
9	<b>Kegiatan:</b> Pengembangan Inovasi dan Teknologi  <b>Sub Kegiatan:</b> Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Rp	10.000.000	8.713.000	1.287.000	87%
<b>Jumlah</b>			1.710.959.625	1.644.838.150	66.124.475	

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Terkait tugas pokok dan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi Jawa Timur terus dilaksanakan. Selain itu juga telah dilaksanakan koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan untuk proses lelang belanja modal aset tak berwujud.

Pada Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, sub kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dokumen Kajian analisa pengukuran indeks kualitas perencanaan Daerah Kabupaten Lumajang telah selesai sedangkan secara penganggaran masih pada tahap pengajuan pencairan. Sedangkan fasilitasi yang telah di laksanakan adalah fasilitasi dan konsultasi terkait peraturan kelitbangan ke Balitbang Provinsi Jawa Timur. Capaian kinerja pada program ini sebesar 33%.

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata telah terealisasi 100% pada Triwulan 3.

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika sudah selesai di laksanakan, sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Capain kinerja program ini adalah 100%. Capaian anggaran 100%.

Pengembangan Inovasi dan Teknologi Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi sudah melakakukan fasilitasi terhadap 2 kegiatan yaitu penyelenggaraan Inotek Award di tingkat provinsi jawa Timur dan penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang di selenggarakan oleh Kementrian PANRB. Fasilitasi HKI sudah terselenggarakan pada tribulan ke 3.

**D. RENCANA TINDAK LANJUT.**

Kegiatan yang berhubungan dengan pihak ketiga, perlu di dorong untuk segera dilaksanakan sesuai time schedule yang direncanakan.

**E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.**

- Laporan kurang baik
  - Laporan sudah baik
  - Laporan diperbaiki
  - Target dan realisasi diteliti ulang
  - Capaian diteliti ulang
  - Lain-lain .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

**BAB III**  
**PENUTUP**

Laporan Kinerja Tribulan ke IV Tahun 2022 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang penelitian dan pengembangan telah di laksanakan dengan baik;
2. Pencapaian sasaran kinerja pada sub bidang pada Tribulan ke IV sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Lumajang, Januari 2023

Mengetahui,  
Kepala Bappeda

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



**Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si**  
NIP. 19670325 199312 2 001



**Dr. IMANNURDIN ABDILLAH**  
NIP. 19811021 201001 1 013

**LAPORAN KINERJA PEJABAT  
BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, merupakan suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan sifat dan kegiatan bidang dengan tujuan agar masing-masing unit OPD dapat mempertanggungjawabkan hasil kegiatan unit yang berada dibawah pengawasannya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggam-

barkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap pencapaian kinerja yang telah disepakati.

Dalam Laporan Kinerja Tribulan IV Tahun 2022 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 63 Tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan Evaluasi Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan informasi pembangunan daerah;
- pelaksanaan analisis serta pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan;
- pelaksanaan pengolahan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

- pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan;
- pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- penyajian dan pengamanan data dan informasi pembangunan daerah;
- penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk menyiapkan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- pelaksanaan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan perencanaan ke depan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terdiri 3 sub bidang, antara lain :

- a. **Sub Bidang Data dan Informasi;**
- b. **Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;**
- c. **Sub Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.**



## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi dengan Sub Koordinator Data dan Informasi, Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan serta Sub Koordinator Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan dengan terdapat target kinerja yang harus dipenuhi oleh, yaitu:

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN ANGGARAN : 2022**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya Tahapan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100%
2	Terfasilitasinya tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100%
3	Terfasilitasinya Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100%

KEGIATAN		ANGGARAN
1	Perencanaan dan Pendanaan	Rp 1.472.545.275
2	Data dan Informasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 113.950.000
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 96.894.775
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.685.390.050</b>

## B. CAPAIAN KINERJA

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/kegiatan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi, serta target kinerja yang harus dicapai pada Tribulan IV tahun 2022.

Tabel 2  
Realisasi Program Kegiatan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sampai Tribulan IV Tahun 2022

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terfasilitasinya Tahapan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100%	80,95%	80,95%
2	Terfasilitasinya tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100%	100%	%
3	Terfasilitasinya Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100%	100%	100%

### 1.2. Cost per outcome Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Tri Bulan IV, Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		EFISIENSI
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Target	Realisasi	
1	Perencanaan dan Pendanaan	1.472.545.275	1.072.539.700	72,86	100	80,95	80,95
2	Data dan Informasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	113.950.000	112.044.000	98,33	100	100	100
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	98.694.775	79.084.000	79,97	100	100	100

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Terkait tugas pokok dan fungsi Bidang Data dan Evaluasi Bappeda sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani, sedangkan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi Jawa Timur terus dilaksanakan.

Adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat daerah menyebabkan pelaksanaan program kegiatan serta aktifitas kinerja perencanaan menjadi terganggu karena menunggu penyesuaian regulasi dan pengesahaan dari perubahan tersebut sehingga jadwal pelaksanaan aktifitas kegiatan menjadi molor bahkan beberapa aktifitas terpaksa tidak dilaksanakan.

Terkait kegiatan, sampai pada tribulan ke IV tahun 2022, capaian target kinerja keuangan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam time schedule kegiatan. Hal dapat dilihat dari penyelesaian kegiatan-kegiatan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi secara fisik sudah dilaksanakan tetapi realisasi anggaran tidak terlaksana karena keterbatasan waktu disamping itu beberapa kegiatan juga tidak terlaksana akibat dasar pelaksanaan kegiatan penerbitannya terlambat..

### D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Pencapaian tribulan 4 ini akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran berikutnya agar bisa berjalan lebih baik lagi dan sesuai target, baik secara kinerja maupun target keuangan.

### E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan IV Tahun 2022 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi telah di laksanakan dengan baik;
2. Pencapaian sasaran kinerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi belum sesuai dengan yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja demikian juga target kinerja keuangan belum sesuai target karena ada beberapa kelengkapan administrasi yang perlu dipenuhi. Dalam tahun 2022 ke depan akan dilakukan upaya-upaya koordinasi yang lebih baik lagi agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan baik.
3. Pencapaian sasaran kinerja Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi yang belum tercapai akan dilaksanakan pada tribulan IV

Lumajang, Januari 2023

Mengetahui,  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN LUMAJANG

  
Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si  
NIP. 19670325 199312 2 001

KABID DATA DAN EVALUASI  
BAPPEDA KAB. LUMAJANG

  
SYAIFUDDIN ZUHRI  
NIP. 197200107 199803 1 006

**LAPORAN KINERJA PEJABAT  
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tri Bulan IV Tahun 2022 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Pengoordinasian bahan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- f. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di daerah dan Kabupaten/Kota yang lain bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. Pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri 3 sub bidang, antara lain :

- a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- c. Sub Bidang Pemerintahan.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdapat target kinerja yang harus dipenuhi, yaitu :

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA**  
**BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan OPD	90%

	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp	1.082.834.285
	Jumlah Total	Rp	1.082.834.285

**B. CAPAIAN KINERJA**

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2022.



**Tabel 2.1. Realisasi Program Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tribulan IV Tahun 2022**

NO	SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan OPD	90%	90%	100%

**2.2. Cost per outcome Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Tri Bulan IV-Tahun 2022**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisien
			Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target	Realisasi	Capaian	
1	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan OPD	1.082.834.285	1.024.500.455	94,61	90%	90%	100%	

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Terkait tugas pokok dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten terkait peningkatan IPM, aksi penanggulangan stunting, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan kapasitas aparaturnya kecamatan telah dilaksanakan dengan baik, koordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi juga telah dilaksanakan dengan baik. Koordinasi yang memerlukan perhatian lebih adalah terkait percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, karena berhubungan dengan kinerja pemerintah desa dalam melakukan verifikasi data kemiskinan ekstrem.

Program kerja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tribulan IV tahun 2022 dapat dilihat bahwa capaian anggaran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mencapai 94,61% anggaran terserap dari total anggaran sebesar Rp. 1.082.834.285,-, sedangkan kinerja sebesar 90% dari target kinerja 90%, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100%.

Daftar Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tri Bulan IV adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29.649.000	26.706.500	90,08 %
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	135.612.550	134.045.777	98,84 %

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	67.852.925	66.477.000	97,97 %
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	164.120.280	136.949.750	83,44 %
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	386.919.650	372.159.428	96,19 %
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	49.050.000	44.660.000	91,05 %
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	249.629.880	243.502.000	97,55 %

#### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Fungsi dan tugas bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam menyiapkan bahan perencanaan dan koordinasi harus lebih ditingkatkan agar perencanaan yang telah dibuat tepat sasaran/efektif sesuai kebutuhan dan efisien secara anggaran. Sedangkan kegiatan tambahan yang dilaksanakan diharapkan bisa mendukung fungsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia secara maksimal.

Selain itu, kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta penyusunan dokumen kajian dan rencana aksi yang bekerjasama dengan pihak ketiga, perlu didorong untuk dilakukan penyelesaian secara administrasi keuangan. Sehingga target kinerja kegiatan dan target kinerja keuangan akan selesai tepat pada waktunya.

### E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....
- .....

### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tri Bulan IV Tahun 2022 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia telah dilaksanakan dengan baik sampai dengan tribulan IV tahun 2022.
2. Pencapaian sasaran keuangan dan kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sudah cukup baik. Untuk capaian penyerapan keuangan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mencapai 94,61% dari total anggaran sebesar Rp. 1.082.834.285,-, dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 100% yang didukung dengan capaian kinerja dari total 7 Sub kegiatan.
3. Beberapa rencana aksi pada sub-sub kegiatan telah terlaksana.

Mengetahui,  
KEPALA BAPPEDA

  
Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si.  
NIP. 19670325 199312 2 001

Lumajang, Januari 2023

KABID PEMERINTAHAN DAN  
PEMBANGUNAN MANUSIA

  
FAHRIZAL MUTTAQIEN A., ST.  
NIP. 19850331 200903 1 004

**LAPORAN KINERJA  
BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR  
DAN KEWILAYAHAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Pertanggung jawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas **Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan** terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja **Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan** yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 108 Tahun 2021, **Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan yang meliputi pariwisata, penanaman modal, koperasi usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, badan usaha milik daerah, lingkungan hidup, kebencanaan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kabid Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga/Provinsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama antar daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; 10
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kabid Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan adalah dengan mewujudkan 1 (satu) Target Kinerja, 2 (dua) Indikator Sasaran Strategis yaitu terwujudnya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta terwujudnya koordinasi bidang perekonomian dan SDA.

Tabel .1  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

No.	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dimanfaatkan PD	90 %
2	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian dan SDA	Persentase dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan PD	85 %

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	514.078.500,-
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	986.717.500,-
	<b>Jumlah Total</b>	<b>1.500.796.000,-</b>

**B. CAPAIAN KINERJA**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan sampai dengan Tribulan IV Tahun 2022 :

Tabel 2.1  
**Capaian Kinerja Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sampai dengan Tribulan IV Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dimanfaatkan PD	90 %	100%	111,1%
2	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian dan SDA	Persentase dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan PD	85 %	100%	117,6%



Tabel 2.2

**Cost per outcome Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Tri Bulan IV, Tahun 2022**

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			P	R	C (%)	T	R	%	
1	Terwujudnya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dimanfaatkan PD	514.078.500	413.142.170	80,37 %	90 %	100 %	111,1 %	30,73 %
2	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian dan SDA	Persentase dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan PD	986.717.500	945.216.372	95,79 %	85 %	100 %	117,6 %	21,81 %

### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan Tabel diatas, untuk capaian kinerja pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan di TW IV Tahun 2022 untuk bidang infrastruktur dan kewilayahan adalah 111,1% dengan capaian anggaran sebesar 80,37% dan diperoleh nilai efisiensi sebesar 30,73 %. Sedangkan keterserapan anggaran Berdasarkan tabel di atas untuk Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebesar Rp. 413.142.170,- dari total anggaran Rp. 514.078.500,-. Untuk Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan di TW IV Tahun 2022, berdasarkan tabel, capaian kinerja bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah 117,5 % dengan capaian anggaran sebesar 95,79 % dan diperoleh nilai efisiensi sebesar 21,71 % dan untuk realisasi anggaran berdasarkan tabel yang telah direalisasi sebesar Rp. 945.216.372,- dari total anggaran Rp. 986.717.500,-. Sesuai dengan data diatas efisiensi capaian kinerja pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan di TW IV Tahun 2022 adalah 26,27%

### D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dari realisasi capaian kinerja dan capaian anggaran pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sampai dengan TW IV Tahun 2022 beberapa kegiatan telah dilaksanakan. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan secara terus

menerus dan berkelanjutan akan tetap memfasilitasi dan mendukung terwujudnya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA

**E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.**

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan IV tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 108 Tahun 2021, dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 1 Program dengan 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 2 (dua) Indikator Kinerja yang ditetapkan, realisasi anggaran mencapai 90,51 % dan realisasi kinerja mencapai 100%.

Lumajang, Januari 2023

Mengetahui,  
Kepala BAPPEDA



Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si.  
NIP 19670325 199312 2 001

Kabid PSIK



VENDY PRAYADIKA WIDHARMA, ST., MT.  
NIP 19860620 200903 1 002